

**PENGARUH PENATAUSAHAAN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi pada Kantor Pusat dan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)**

Periode 2017

***THE EFFECT OF ADMINISTRATION AND APPLICATION STATE ASSET
MANAGEMENT ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM ON THE QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENT
(Study at Head Office and Regional Office Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI
Jakarta)***

**Novira Juwita Andiani¹, Dini Wahyu Hapsari, SE., M.Si., Ak.²,
Muhamad Muslih, S.E., MM.³**

Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

novirajuwita@telkomuniversity.co.id¹, dinihapsari@telkomuniversity.co.id²,
muhamadmuslih@telkomuniversity.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penatausahaan, dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DKI Jakarta, seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Analisis data menggunakan SPSS versi 23 dengan variabel bebas adalah pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN, variabel terikatnya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, dan ditemukan hasil bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, SIMAK BMN dan kualitas laporan keuangan.

Abstract

This study to determine the effect of administration and application of SIMAK BMN on the quality of financial statement at head office and regional office of Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta either simultaneously and partially. This study was conducted by distributing questionnaires. The population in this study were employees who are pointed as accounting officers of state property at the head office and regional office of DKI Jakarta. All members of population used as a sample. Analysis data used SPSS version 23 with independent variables are bookkeeping, inventory, and reporting, dependent variable is quality of financial statements. The analytical tool used is multiple linear regression, and found the results that bookkeeping, inventory, reporting and application of SIMAK BMN has a simulan impact on quality of financial statements. In partial, bookkeeping has a significant positive effect on the quality of financial statements, inventory does not affect on the quality of financial statements, reporting does not significantly influence, but positively affect on the quality of financial statements and the application of SIMAK BMN has no effect on the quality of financial statements.

Keyword : Bookeeping, Inventory, Reporting, SIMAK BMN, and quality of financial report.

1. Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah kepada rakyatnya saja, tetapi juga merupakan indikator dari kredibilitas pemerintah itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tercermin didalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penegelolaan kekayaan negara, salah satu upaya kongkritnya adalah dengan memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang lebih baik dari periode sebelumnya, ditandai dengan berubahnya opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP misal, dari opini tidak memberikan pendapat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), atau dari WDP menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satu cara untuk mewujudkan opini WTP adalah dengan mengelola barang milik negara (BMN) dengan benar. Pengelolaan BMN erat kaitannya dengan laporan keuangan karena dalam laporan keuangan disajikan juga laporan BMN.

Berdasarkan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2012 – 2014 diperoleh temuan terkait penatausahaan BMN, diantaranya belum dilakukan inventarisasi terhadap BMN, pengpausbukuan barang yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta pencatatan dan pelaporan yang belum memadai. Penatausahaan BMN itu sendiri, terdiri dari pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam penatausahaan BMN dibantu dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN merupakan sistem yang wajib digunakan dalam melakukan penatausahaan BMN, pengimplemntasiannya harus dilakukan secara optimal agar laporan keuangan terjamin kualitasnya.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 Pasal 1 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Sedangkan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 Pasal 3 menyatakan bahwa Ruang Lingkup Penatausahaan BMN meliputi, Pembukuan yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang; Inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; dan Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Pembukuan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 84 mengungkapkan bahwa Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang/ Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan dimaksudkan agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dan BMN dalam pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Tujuan dilakukannya pembukuan adalah tersedianya data BMN yang baik, dan terwujudnya tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, serta optimal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/2016 pelaksanaan pembukuan, meliputi : pencatatan semua BMN, mutasi BMN, hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, menyusun daftar barang yang datanya berasal dari Buku Barang dan Kartu Identitas Barang, mencatat perubahan atas perpindahan dan perubahan kondisi barang, melakukan penghapusan atas barang rusak berat dan barang hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap barang hilang yang ditemukan kembali.

Inventarisasi Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/ PMK.06/ 2016 inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola. Tujuan inventarisasi adalah tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik, serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Pelaksanaan inventarisasi, meliputi : pemberian nomor dan nama ruangan pada denah lokasi, pelaksanaan sensus barang sekurang-kurang sekali dalam lima tahun, mencatat hasil inventarisasi ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi, mengelompokkan dan memberi kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi

barang, menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI), menyampaikan laporan hasil inventarisasi, serta memperbaharui hasil inventarisasi.

Pelaporan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 181/ PMK.06/ 2016 pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud Pelaporan agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat setiap semester dan tahun, guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah.

Pelaksanaan pembukuan meliputi : penyampaian Daftar Barang Kuasa Pengguna kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Wilayah dan Eselon I, menyusun dan menyampaikan Daftar Barang Rusak Berat dan Daftar Barang Hilang, menyampaikan mutasi BMN pada Daftar Barang Kuasa Pengguna, menyampaikan laporan hasil inventarisasi, laporan barang kuasa pengguna, dan laporan kondisi barang secara periodik.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

Menurut Mahsun dkk. (2011:178) SIMAK BMN merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LMBN) serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

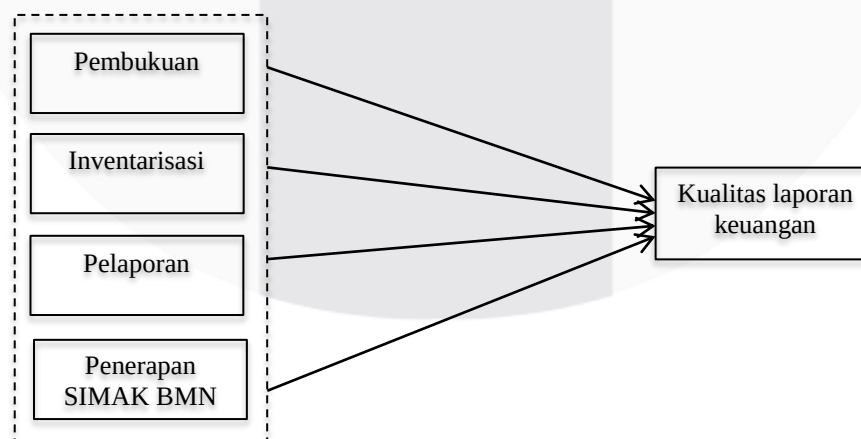
Menurut lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pada bagian keempat menyebutkan bahwa SIMAK BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. SIMAK BMN diselenggarakan oleh unit dengan prinsip-prinsip ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Sektor Publik (Bastian, 2010:297) merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan pelaporan keuangan umum sektor publik adalah menyediakan informasi untuk keperluan pengambilan keputusan dan mendemonstrasikan akuntabilitas organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk memujudkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif yang diartikan sebagai ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Empat prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang diinginkan, yaitu : (i) relevan, yaitu memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap; (ii) andal, yaitu penyajiannya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas; (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan/atau entitas yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama; dan (iv) dapat dipahami, informasi yang disajikan dan istilah yang digunakan dapat dipahami oleh pengguna.

Secara sistematis, kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori diatas ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- Berpengaruh Secara Parsial
 - - - Berpengaruh Secara Simultan

Gambar 1 menjelaskan hubungan pengaruh parsial dan simultan antara variabel X dan Y. Jika pembukuan dilaksanakan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika inventarisasi dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika pelaporan dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Jika penerapan SIMAK BMN dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Sehingga secara simultan atau bersama-sama, jika pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN tinggi, maka akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang semakin baik.

Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ditunjuk sebagai petugas akuntansi BMN yang bekerja pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta, teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer, melalui penyebaran kuesioner, dan didapat 45 responden yang berada pada bagian umum dan 7 Direktorat yang berada pada Kantor Pusat, serta Bagian Umum dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

3. Pembahasan

Uji validitas dan reliabilitas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis deskriptif. Kedua pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pernyataan yang diajukan dalam kuesioner layak untuk diajukan dan digunakan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya dapat melakukan analisis deskriptif yang hasilnya ada dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata				
	STS	TS	N	S	SS
Pembukuan	0	1	7	23	14
Inventarisasi	0	3	8	23	11
Pelaporan	0	3	8	24	10
Penerapan SIMAK BMN	0	1	10	22	12
Kualitas Laporan Keuangan	0	1	4	26	14

Sumber : Data Primer yang telah diolah SPSS (2017)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dalam menjawab pernyataan pada variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN dan kualitas laporan keuangan dengan ini maka setiap pernyataan yang diajukan kepada responden melalui kuesioner sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN dan kualitas laporan keuangan telah berada pada kategori baik atau tinggi.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas tidak ada pernyataan yang harus dihilangkan, semua pernyataan dalam indikator pada variabel pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penerapan SIMAK BMN, dan kualitas laporan keuangan dinyatakan valid karena r hitung yang diperoleh dari masing-masing variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0,294 dan dinyatakan reliabel karena dari hasil yang diperoleh menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni normalitas ketiga variabel tersebut berdistribusi normal yakni sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,053. Berdasarkan uji multikolinearitas menunjukkan ketiga variabel memiliki nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10 artinya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel. Berdasarkan uji heteroskedastisitas pola yang dihasilkan menyebar baik dibawah angka 0 maupun sumbu Y ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda seperti tabel berikut

Tabel 2. Hasil Analisis regresi Linier Berganda

Model	B	thitung	Sig.t
Konstanta	15,470		
Pembukuan	0,980	5,585	0,000
Inventarisasi	-0,239	-1,220	0,230
Pelaporan	0,150	0,694	0,492
SIMAK BMN	-0,138	-0,602	0,550
R (korelasi)	0,662		
<i>Adjuste R Square</i>	<i>0,628</i>		
F hitung	19,552		
Sig. F	0,000		
Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan			

Sumber : Data Primer yang telah diolah SPSS (2017)

Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan SIMAK BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan *output* pada Tabel 2, diperoleh nilai F hitung sebesar 19.552. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) atau 5-1 yaitu sebesar 4, dan df 2 (n-k-1) atau 45-4-1 yaitu sebesar 40, maka diperoleh F tabel sebesar 2,61. Karena F hitung > F tabel, maka $H_{0,1}$ ditolak dan $H_{a,1}$ diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin baik pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik pula.

Hal ini ditunjang pula oleh penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel pembukuan dimana skor rata-rata persentase sebesar 83,85% menyetujui pernyataan yang dipaparkan, dapat diartikan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sudah cukup tinggi atau baik terhadap kualitas laporan keuangan.

Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai inventarisasi BMN sebesar 80,95% yang artinya inventarisasi yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai pelaporan BMN sebesar 78,22% yang artinya pelaporan yang dilakukan petugas akuntansi BMN berada pada kategori tinggi atau baik. Skor rata-rata untuk tanggapan responden mengenai penerapan SIMAK BMN sebesar 79,48% yang artinya penerapan SIMAK BMN yang dilakukan petugas akuntansi BMN juga berada dalam kategori tinggi atau baik.

Walaupun secara parsial dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14 variabel inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN memiliki hasil yang baik. Sehingga jika diimbangi bersama-sama dengan variabel lain, yakni pembukuan BMN yang telah memadai, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggreani (2015) dan Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa secara simultan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Tabel 2. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel pembukuan BMN (X_1) sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{0,2}$ ditolak dan $H_{a,2}$ diterima, hal ini berarti pembukuan BMN secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin tinggi atau baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan, maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

Hasil tanggapan responden terhadap pembukuan MN mendapat persentase skor total yang berada dalam kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa petugas akuntansi BMN telah mencatat semua BMN ke dalam Buku Barang (BB) dan Kartu Identitas Barang (KIB) sebesar 97,3% dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta sudah cukup baik atau tinggi.

Tingginya pembukuan yang dilakukan petugas akuntansi BMN tersebut meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu, petugas akuntansi BMN selalu melakukan pencatatan mutasi, hasil inventarisasi, menyusun daftar barang, mencatat pemindahan barang, kondisi barang, menghapus barang rusak dan barang hilang, serta mereklasifikasi barang hilang yang ditemukan kembali. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju rata-rata sebesar 83,85%.

Penelitian ini juga menunjukkan arah hubungan yang positif, yaitu pembukuan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik petugas akuntansi BMN melakukan pembukuan BMN, maka baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya proses pembukuan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dikarenakan pembukuan BMN merupakan faktor krusial dalam penatausahaan BMN, salah satu tujuan pembukuan BMN merupakan tertib administrasi BMN yang efektif, efisien, dan optimal agar tercipta kualitas laporan keuangan yang baik.

Inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 2. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel inventarisasi BMN (X_2) sebesar 0,230 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,3}$ ditolak dan $H_{0,3}$ diterima, hal ini berarti inventarisasi BMN secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya terdapat faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap variabel inventarisasi, dapat dilihat bahwa 80,95% menyetujui pernyataan yang dipaparkan, artinya inventarisasi BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tanggapan responden terhadap pernyataan penyampaian laporan hasil inventarisasi sebesar 92,89% nilai ini termasuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik. Kemudian hasil tertinggi lainnya berasal dari tanggapan responden terhadap pernyataan pencatatan hasil inventarisasi ke dalam kertas kerja inventarisasi sebesar 84,44%, sedangkan pernyataan responden mengenai pelaksanaan sensus barang memperoleh persentase sebesar 76,44%.

Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada indikator pertama, yaitu pemberian nomor dan nama ruangan sebanyak 13% petugas akuntansi BMN memberikan tanggapan tidak setuju karena indikator pada variabel ini saling terkait dengan indikator selanjutnya maka ditemukan pula responden yang memberikan tanggapan sangat tidak setuju dan tidak setuju untuk ke-enam indikator lainnya. Jadi, apabila petugas akuntansi BMN tidak melaksanakan pemberian nomor dan nama ruangan, ketika melakukan sensus barang petugas akuntansi BMN tidak memiliki data seperti nomor dan nama ruangan yang sudah tercatat, selanjutnya jika petugas akuntansi BMN tidak melaksanakan sensus, maka petugas akuntansi BMN tidak dapat menghasilkan hasil inventarisasi dan melakukan penggolongan barang, serta tidak dapat menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

Meskipun demikian, persentase tanggapan responden pada indikator pencatatan hasil inventarisasi berada pada kategori sangat baik yaitu pencatatan hasil inventarisasi ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi (KKI). Hal ini mungkin saja terjadi karena pencatatan hasil inventarisasi bisa saja berasal dari dokumen sumber terkait pencatatan mutasi BMN pada proses pembukuan, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST), dokumen kepemilikan, pengadaan, pemeliharaan, pengelolaan, dan dokumen sumber terkait lainnya. Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh proses inventarisasi yang sudah cukup terakomodir oleh proses pembukuan sehingga apabila inventarisasi tidak dilakukan, kualitas laporan keuangan akan tetap baik asal pembukuannya juga dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa variabel inventarisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 2. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat signifikansi variabel pelaporan BMN (X_3) sebesar 0,492 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,4}$ ditolak dan $H_{0,4}$ diterima, hal ini berarti pelaporan BMN secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya terdapat faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Hasil pengujian statistik deskriptif mengenai pelaporan menunjukkan skor rata-rata persentase tanggapan responden pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berada pada kategori tinggi, dikatakan demikian karena pada indikator penyampaian Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Rusak Berat, Daftar Barang Hilang, mutasi, Laporan Hasil Inventarisasi, Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Kondisi Barang mendapat persentase sebesar 78,22%.

Berdasarkan statistik deskriptif, mayoritas hasil dari jawaban responden menyatakan bahwa pelaporan telah memiliki hasil yang baik. Tetapi walaupun pelaporan berada pada kategori baik, namun jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. dapat dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap subvariabel relevan pada variabel kualitas laporan keuangan berada pada kategori baik, meskipun pada variabel pelaporan masih ada responden sebesar 21,78% yang memberikan tanggapan tidak setuju. Artinya, walaupun tidak semua petugas akuntansi BMN melaksanakan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, laporan keuangan yang dihasilkan akan tetap dapat memberikan manfaat umpan balik, prediktif, dan tepat waktu yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan BMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran petugas akuntansi BMN bahwa pelaporan BMN merupakan bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan bahan penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) yang menyatakan bahwa proses pelaporan setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan dalam laporan keuangan akan membantu untuk melakukan analisis-analisis yang berhubungan dengan kinerja pemerintah.

Penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan tabel 2. dari hasil pengolahan menggunakan SPSS, diperoleh tingkat sigifikansi SIMAK BMN (X^2) sebesar 0,550 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa $H_{1,5}$ ditolak dan $H_{0,5}$ diterima, hal ini berarti SIMAK BMN secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan artinya terdapat faktor-faktor atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.

Hal ini dapat dilihat sebanyak 79,48% dari responden menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Artinya, penerapan SIMAK BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berada pada kategori baik. Dari hasil tanggapan responden mayoritas petugas akuntansi BMN sudah melakukan penerapan SIMAK BMN dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN, yakni ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, objektif, dan kelengkapan. Namun, pada indikator ketaatan, ditemukan 3 petugas akuntansi BMN yang menjawab tidak setuju dan 15 petugas akuntansi BMN yang memberikan jawaban netral yang artinya masih ada petugas akuntansi BMN yang tidak melaksanakan penerapan SIMAK BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada indikator kelengkapan juga ditemukan 2 petugas akuntansi BMN yang menjawab sangat tidak setuju, dan 1 petugas akuntansi BMN memberikan jawaban tidak setuju, berarti petugas akuntansi BMN tersebut berpendapat bahwa SIMAK BMN belum mencakup seluruh transaksi yang terjadi. Meskipun begitu, kualitas laporan keuangan berada pada kategori baik, indikator lengkap pada variabel kualitas laporan keuangan mendapat persentase 84,88% yang artinya berada pada kategori sangat baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMAK BMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada kenyataannya, di Kantor Pusat dan DJKN tidak semua Direktorat melaksanakan penerapan SIMAK BMN, sehingga petugas akuntansi BMN pada beberapa Direktorat kurang memahami prinsip-prinsip penerapan SIMAK BMN. Oleh karena itu, rata-rata 19% petugas akuntansi BMN yang memberikan tanggapan netral pada variabel ini. Hal tersebut yang menyebabkan penerapan SIMAK BMN tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Diani (2014) yang menyatakan pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dikarenakan Pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem tersebut, padahal Sistem Informasi Keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penatausahaan dan penerapan SIMAK BMN terhadap kualitas laporan keuangan maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dilihat dari pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Secara deskriptif diperoleh bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berada pada kategori baik.
- 2) Berdasarkan pengujian hipotesis simultan, diperoleh bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Berdasarkan pengujian hipotesis parsial, diperoleh bahwa :
 - a. Pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
 - b. Inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
 - c. Pelaporan tidak memiliki pengaruh signifikan, tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan.
 - d. Penerapan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Daftar Pustaka :

- [1] Anggreani, Ayang P.S. (2015). *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Purbalingga*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim : Malang.
- [2] Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga
- [3] Diani, Dian Irma. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *e- jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 8(3), 442-457.
- [4] Febrianti, Sukma. (2016) Analisa Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 10(1), 151-170.
- [5] Mahsun, Moh., Purwangkara, H.S., dan Sulisty, F. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta: BFE.
- [6] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat. Jakarta: Kementerian Keuangan
- [7] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan
- [8] Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta: Kementerian Keuangan
- [9] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Keuangan
- [10] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan
- [11] Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.